

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Pemerintah wilayah adalah forum yang diberikan kewenangan Pemerintah Pusat buat melaksanakan dan mengatur sendiri kepentingan bangsa dan negara pada wilayah. Lembaga Pemerintah Daerah bertujuan untuk melakukan pembangunan-pembangunan buat kepentingan rakyat generik dengan menyelenggarakan kegiatan Otonomi Daerah. Hal ini memiliki tujuan memajukan setiap wilayah yang sebagai wewenang Pemerintah Daerah.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, pemerintah Daerah berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri semua pemerintahan dan pembangunan pada wilayah dari perundang-undangan yang berlaku, tidak ada batasan bagi otonomi daerah buat memajukan, memfasilitasi, dan membentuk setiap wilayah. Dalam pelaksanaan Otonomi Dearah terdapat dua asas yaitu asas desentralisasi dan dekonsentrasi.

Dalam Program Otonomi Daerah pastinya Pemerintah Daerah membutuhkan sistem keuangan yang baik buat menjalankan APBD yang bersifat efisien dan akuntabel. Dengan melaksanakan Manajemen keuangan wilayah, manajemen keuangan wilayah adalah galat satu kunci pada pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah. Hal ini bertautan menggunakan analisis terhadap kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan sebagai asal berita yang krusial untuk menciptakan segala kebijakan berkaitan menggunakan pengelolaan keuangan wilayah.

Rasio yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli, dan rasio efisiensi PAD.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan kinerja keuangan Pemda Kota Medan dengan menggunakan analisis Rasio Derajat Desentralisasi,

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli, dan Rasio Efisiensi PAD.

Dengan latar belakang diatas, maka peneliti terdorong untuk mengangkat judul “Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2016-2020.”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah rasio keuangan daerah Kota Medan selama tahun anggaran 2016-2020?
2. Apakah kinerja keuangan daerah Kota Medan dapat dinyatakan baik atau tidak dilihat dari Rasio Keuangan tahun anggaran 2016-2020?
3. Apakah keadaan keuangan Pemerintah Kota Medan saat ini dapat dinyatakan baik atau tidak, dilihat dari urutan kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2016-2020?

1.3 Tinjauan Pustaka

A. Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Menteri Keuangan RI menurut keputusan No. 740/KMK.00/1989 128 Juni 1989, kinerja merupakan prestasi yang diperoleh bagi perusahaan selama periode eksklusif yang mencerminkan taraf kesehatan berdasarkan perusahaan tersebut. Pengukuran kinerja bertujuan buat mengukur kinerja usaha dan manajemen dibandingkan menggunakan tujuan atas target perusahaan.

Menurut Munawir (2010:30), kinerja keuangan perusahaan adalah satu diantara dasar evaluasi tentang syarat keuangan perusahaan yang dilakukan menurut analisa rasio keuangan perusahaan. Pihak yang berkepentingan paling memerlukan output berdasarkan pengukuran kinerja keuangan perusahaan untuk dapat melihat syarat perusahaan dan taraf keberhasilan perusahaan pada menjalankan aktivitas operasionalnya.

Menurut Yuwono dkk (2003:31), adanya standar rasio keuangan, perusahaan dapat menentukan apakah kinerja keuangannya baik atau tidak. Dilakukannya penilaian ini dengan membandingkan rasio keuangan yang diperoleh dengan standar rasio keuangan yang ada. Pada umumnya kinerja keuangan perusahaan bernilai sama dengan atau diatas standar rasio keuangan.

B. Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah

Sistem yang bertujuan dalam membantu manajer publik menilai pencapaian sebuah strategi melalui indera ukur finansial dan non-finansial adalah sistem pengukuran kinerja sektor publik. Ada tiga tujuan yang dilaksanakan untuk memenuhi Pengukuran kinerja sektor publik. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik bertujuan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja bertujuan bisa membantu pemerintah serius dalam tujuan dan target program unit kerja. Akhirnya dalam hal ini akan menaikkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam menaruh pelayanan sektor publik. Kedua, berukuran kinerja sektor publik dipakai buat mengalokasikan asal daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, berukuran kinerja sektor publik bertujuan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Ulum, 2009:19-21).

C. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan aturan (*budgetary reports*), laporan finansial dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan aturan terdiri berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) & Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Laporan finansial terdiri berdasarkan Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) & Laporan Arus Kas. CaLK adalah laporan yang merinci atau menyebutkan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan aturan juga laporan finansial dan adalah laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan aturan juga laporan finansial.

D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Mahsun dkk (2011:81), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan daftar yang menampilkan rincian penerimaan wilayah dan pengeluaran wilayah selama satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan menggunakan peraturan wilayah buat masa satu tahun, mulai 1 Januari hingga 31 Desember. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pasal 1 Ayat 1, pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan program keuangan tahunan pemerintahan wilayah yang dibahas dan disahkan oleh Pemda dan DPRD, dan ditetapkan menggunakan peraturan wilayah.

E. Analisis Laporan Keuangan

Teknik yang dilakukan dalam melakukan Analisis Laporan Keuangan, adalah menggunakan perhitungan Rasio Keuangan. Dalam organisasi pemerintah buat mengukur kinerja keuangan terdapat beberapa berukuran kinerja, yaitu:

1. Rasio Derajat Desentralisasi

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan Asli} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

4. Rasio Efisiensi PAD

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Tabel 1.1
**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2016-2020 Pemerintah Kota Medan (Dalam Milyaran rupiah)**

uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan	4.308.066	4.409.065	4.253.618	5.518.768	3.988.761
Pendapatan asli daerah	1.535.259	1.739.756	1.636.204	1.829.665	1.509.831
Pendapatan Transfer	1.900.853	2.122.769	2.157.180	2.156.807	2.056.223
Lain-lain pendapatan yang sah	871.953	546.539	460.233	1.532.294	422.707.329
Belanja	4.525.231	4.395.825	4.125.003	5.060.725	3.854.742
Belanja tidak langsung	1.974.568	1.739.536	1.738.114	2.048.362	2.076.255
Belanja Langsung	2.550.662	2.656.288	2.476.889	3.012.363	1.778.487

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kota Medan

1.4 HIPOTESIS PENELITIAN

Berdasarkan Rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ : Kinerja keuangan dapat dikatakan baik dilihat dari rasio keuangan tahun anggaran 2016-2020.

H₂: Kondisi keuangan Pemerintah kota medan dapat dikatakan baik dilihat dari perkembangan kinerja keuangan pemerintah kota medan tahun anggaran 2016-2020.